

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan, alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan berdasarkan potensi yang dimiliki untuk mencapai pembangunan desa yang diharapkan, serta memiliki kekayaan dan asset.

Prioritas penggunaan dana desa pada tahun harus memberikan suatu manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, dengan prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di dalam bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa. Desa juga menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat dalam bentuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Dari banyaknya sumber pendapatan desa terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan keuangan Desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan di desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa, serta menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, maka diterbitkan Surat Edaran Menteri Desa, PDT , dan Transmigrasi .

Presiden menegaskan pentingnya penguatan sinergi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui Padat Karya Tunai (Cash for Work). Dalam upaya mempercepat pemecahan masalah kemiskinan, kesenjangan dan masalah stunting di desa, mulai tahun 2018, Presiden menugaskan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) diseluruh Desa. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang penyelarasan dan penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” hal ini menggambarkan bahwa pembangunan desa menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Berbagai dasar hukum tentang birokrasi pemerintahan desa mulai dijalankan dan diawasi oleh pihak terkait demi terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka penyelenggaraan pemerintah desa mengalami beberapa perubahan terhadap pelaksanaannya. Penetapan Undang-Undang ini mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek dalam pembangunan. Undang-Undang tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa.

Pengelolaan Keuangan Desa telah banyak dilakukan Penelitian Badiana, (2017) yaitu Pengelolaan Keuangan Desa Dalam mewujudkan kemajuan pembangunan Desa studi kasus Pada 5 Desa yang memperoleh penghargaan di Kabupaten Kapahiang menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan di 5 Desa di Kabupaten Kapahiang melalui pemenuhan kebutuhan desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Peran pemerintah desa yaitu dalam memberikan suatu pelayanan, kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan serta pertumbuhan wilayah-wilayah strategis harus ditingkatkan, sehingga dapat

mengembangkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Pada tingkat nasional maupun regional, kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis, sehingga diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan untuk menanggulangnya (Margareni dkk, 2016). Menurut khuzaironi (2015) kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya.

Sehubungan belum banyak penelitian yang mengupas tuntas tentang pengelolaan keuangan desa dalam penanggulangan kemiskinan penerapan di satu desa khusus dan belum banyak penelitian yang mengupas tuntas tentang konsep kemiskinan di Desa sehingga belum diketahui apakah pengelolaan keuangan dalam penanggulangan kemiskinan Desa di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan telah dikelola sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti antara lain :

1. Bagaimana pengelolaan keuangan APBDes di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan?

2. Bagaimana pola pengelolaan perencanaan keuangan APBDes di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan?
3. Bagaimana kendala dan tantangan yang dihadapi di Pemdes Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui akuntabilitas dalam perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.
2. Mengetahui pola pengelolaan perencanaan keuangan Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.
3. Mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi di Pemdes Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam mengembangkan suatu kesejahteraan dalam suatu desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji

faktor-faktor/indikator-indikator lain yang berpengaruh betul dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

## 2. Manfaat bagi Pemerintahan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Desa dan menjadi acuan untuk memperbaiki pola Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan agar dapat terealisasi secara maksimal untuk penanggulangan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.

## 3. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang perkembangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Selain itu, melihat dari hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat dapat memberi kritik maupun saran kepada pengelola Keuangan Desa setempat agar dapat melakukan pengelolaan dengan lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **E. Sistematika Penelitian**

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab sebagai berikut:

### **Bab I      Pendahuluan**

Bab ini merupakan sebuah pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal pokok yang berhubungan dengan penelitian yang meliputi:

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai suatu pendekatan permasalahan yang akan diteliti. Disamping itu terdapat pengujian atas hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Sehingga dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesisnya yang disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini.

## **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian apa saja yang digunakan, yang meliputi: desain penelitian, populasi, sampel dan teknik penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data.

## **Bab IV Analisis Data Dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel (data) yang digunakan dalam penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, dan pembahasan atas hasil analisis data.

## **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya.